

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat telah melaksanakan kegiatan - kegiatan sesuai dengan Program dan rencana Kerja yang telah dibuat. Dasar pelaksanaan kegiatan tersebut adalah :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS
- d. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- e. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- g. Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik;
- h. Keputusan Menteri PAN Nomor Kep/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan dan Kementerian Negara/ Lembaga;
- j. Peraturan Kepala Batan Nomor 92/KA/VI/2008 tentang Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Unit Kerja di lingkungan BATAN;
- k. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2008 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- l. Surat Edaran Nomor 013/PL 03 01/UM/2008 tentang Pelaksanaan Penghematan Penggunaan Energi Listrik tahun 2008.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja, Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BATAN.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Inspektorat terdiri dari :

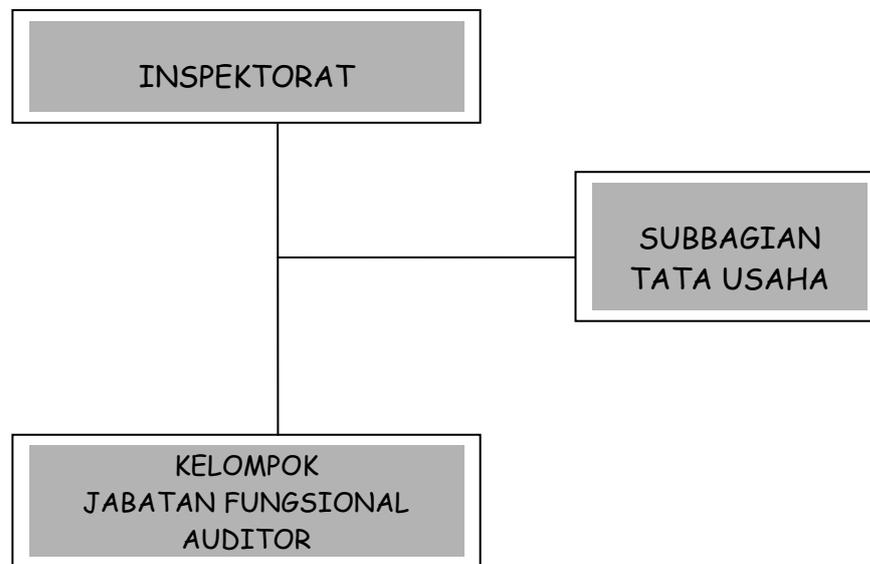
- a. Subbagian Tata Usaha,
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, persuratan dan kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dokumentasi ilmiah, pelaporan dan rumah tangga di lingkungan Inspektorat.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor terdiri dari sejumlah tenaga fungsional Auditor.
- (2) Jenjang jabatan tenaga fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam nomor (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

1.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Susunan Organisasi Inspektorat sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor : 14 Tahun 2013.



1.4. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektorat didukung oleh 26 orang pegawai dan 3 orang tenaga honorer. Berikut tabel pegawai Inspektorat menurut Jabatan, Golongan, Pendidikan dan Jabatan Fungsional (31 Desember 2017).

No.	Uraian	Kepala Unit	Sub Bag TU	Auditor	Honorer	Jumlah Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	8	9
I.	A. STRUKTURAL ESELON I ESELON II ESELON III ESELON IV B. FUNGSIONAL C. STAF	1	1 1 4	19		1 1 20 4	
II.	MENURUT GOLONGAN GOLONGAN IV GOLONGAN III GOLONGAN II	1	5 1	5 13 1		6 18 2	
III.	MENURUT PENDIDIKAN : S3 S2 S1 SARMUD/D3 D2 SLTA SLTP SD	0 1	1	4 11 2		0 5 12 2 0 7 0 0	
IV.	PEGAWAI OUT SOURCHING PENGEMUDI PRAMU KANTOR				2 1	2 1	
I.	JABATAN FUNGSIONAL : a. ADITOR UTAMA b. AUDITOR MADYA c. AUDITOR MUDA d. AUDITOR PERTAMA e. AUDITOR PENYELIA f. AUDITOR PELAKSANA LANJUTAN g. AUDITOR PELAKSANA h. KEARSIPAN	1 4 3 7 2 1 1 1				1 4 3 7 2 1 1 1	

1.5. Sarana dan Prasarana

Inspektorat tidak memiliki gedung sendiri, Inspektorat berada satu gedung dengan kantor pusat sehingga Inspektorat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki kantor pusat yang dalam hal ini dikelola oleh Biro Umum, namun demikian Inspektorat juga memiliki beberapa inventaris yang digunakan untuk menunjang kegiatan Inspektorat

1.6. Rencana Strategis

Visi BATAN disusun dengan mempertimbangkan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan kebijakan litbang nasional yang berada di atasnya yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dan Kebijakan dan Strategi Nasional Iptek 2015-2019. Visi RPJPN 2005 - 2025 mengarah pada terwujudnya Indonesia sebagai negara yang mandiri, maju, adil dan makmur. Sementara itu, RPJMN 2015–2019 menekankan pada pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA lokal, SDM yang berkualitas, dan kemampuan iptek. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ada tiga kata kunci yang ingin dicapai dari pembangunan nasional pada jangka panjang, yaitu kesejahteraan dan kemandirian. Salah satu upaya pemerintah pada jangka menengah untuk mewujudkan kedua hal tersebut adalah melalui peningkatan kemampuan dan keunggulan iptek nasional, termasuk kualitas SDM yang dimilikinya. BATAN sebagai lembaga pemerintah yang diberi amanat untuk melaksanakan penelitian, pengembangan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir, turut bertanggung jawab untuk menciptakan keunggulan iptek tersebut, terutama di tingkat regional. Oleh karena itu, visi BATAN pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel Rencana Strategis Inspektorat

No	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Output
1	2	3	4	5	6	7
1.	BATAN Unggul di Tingkat Regional, Berperan dalam Percepatan Kesejahteraan Menuju Kemandirian Bangsa	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pembinaan melalui pengawasan terhadap unit kerja dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran untuk mencegah penyimpangan dan pemborosan keuangan Negara. Mendorong terwujudnya Auditor Inspektorat yang profesional, obyektif dan berintegritas. Mendorong terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di BATAN. 	<ol style="list-style-type: none"> Terwujudnya BATAN sebagai lembaga unggulan iptek nuklir di tingkat regional Memberikan pelayanan prima dan profesional dalam kegiatan pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi agar tercapai kinerja optimal. 	Peningkatan kinerja Unit Kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui pemerintahan yang bersih (Clean Governance) untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di BATAN	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di BATAN	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah Laporan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di BATAN Jumlah Laporan Hasil Pengawasan di BATAN Kategori Penilaian Kinerja di BATAN Jumlah Laporan dukungan Admin

No	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Output
1	2	3	4	5	6	7
		<p>4. Melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dalam rangka mengawal pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di BATAN.</p> <p>5. Melaksanakan pengawasan secara berkelanjutan sehingga mendorong peningkatan terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di BATAN.</p> <p>6. Melaksanakan dan meningkatkan sistem mutu dalam pelaksanaan pengawasan fungsional dan pengelolaan administrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik.</p>				5. Jumlah Bulan Layanan perkantoran

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN SERTA HASIL YANG DICAPAI

II.1 Kegiatan Inspektorat

Secara umum Inspektorat telah merealisasikan seluruh kegiatan untuk mencapai visi dan misi sebagaimana yang tercantum dalam Renstra 2015-2019. Hasil pencapaian pelaksanaan kegiatan dari tahun ke tahun diharapkan selalu sesuai dengan Renstra dan dokumen perencanaan lainnya.

No.	Output/Sub Output/Komponen	TARGET TAHUN 2017		REALISASI TAHUN 2017	
		Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Aparatur	21 Laporan	100	21 Laporan	100
1.1	Laporan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di BATAN	1 Laporan	100	1 Laporan	100
1.1.1	Laporan Pembentukan Wilayah Bebas Korupsi	1 Laporan	100	1 Laporan	100
1.2	Laporan Hasil Pengawasan di BATAN	18 Laporan	100	18 Laporan	100
1.2.1	Laporan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di BATAN	1 Laporan	100	1 Laporan	100
1.2.2	Laporan Penilaian Kinerja	1 Laporan	100	1 Laporan	100
1.2.3	Laporan Evaluasi Lakin	1 Laporan	100	1 Laporan	100
1.2.4	Laporan Reviu RKA unit kerja di batan Tahun 2018	1 Laporan	100	1 Laporan	100
1.2.5	Laporan Reviu Laporan Keuangan	2 Laporan	100	2 Laporan	100
1.2.6	Laporan evaluasi laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut temuan BPK	1 Laporan	100	1 Laporan	100
1.2.7	Laporan Hasil Audit	9 Laporan	100	9 Laporan	100
1.2.8	Laporan hasil reviu Laporan Kinerja BATAN	1 Laporan	100	1 Laporan	100
1.2.9	Laporan hasil reviu BMN	1 Laporan	100	1 Laporan	100
1.3	Laporan Dukungan Layanan Publik dan Birokrasi	1 Laporan	100	1 Laporan	100
1.4	Layanan Perkantoran	1 Laporan	100	1 Laporan	100

II.1.1 Laporan Pencegahan dan Pemberantasan korupsi di BATAN

Penanggungjawab Chaerudin, SE, yang terdiri atas 1 komponen yaitu :

II.1.1.1 Laporan Pembentukan Wilayah Bebas dari Korupsi

Melakukan penilaian WBK terhadap unit kerja BATAN berdasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB, serta mengusulkan unit kerja yang telah berstatus WBK kepada Kementerian PAN-RB untuk ditetapkan menjadi WBBM.

Penanggungjawab : Wasgiyono, SH

Anggaran : Rp. 18.546.000,-

Realisasi : Rp. 18.394.000,- (99,18%)

Realisasi fisik kegiatan sebesar 100 %.

Uraian Hasil Pelaksanaan kegiatan :

- 1) Dalam rangka meningkatkan wawasan unit kerja terhadap WBK, pada tanggal 9 Februari 2017 dilakukan studi banding ke Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPK yang berlokasi di Tebet Kalibata, dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh pimpinan pusdiklat BPK dan dari BATAN dihadiri oleh perwakilan dari Pusdiklat, PSTNT, PRSG, PPIKSN, Inspektorat dan PTLR.
- 2) Sesuai Nota Dinas Nomor 90/ISP.2/WP00/02/2017 tanggal 28 Februari 2017, Inspektur menyampaikan permohonan persetujuan dan konfirmasi menjadi anggota Tim Penilai Internal kepada 5 Unit Kerja (PTLR, Pusdiklat, PSTNT, PRSG dan PPIKSN).
- 3) Penilaian Unit Kerja oleh Tim Penilai Internal (TPI)
Penilaian dilakukan oleh TPI yang dibentuk atas dasar Surat Keputusan Kepala BATAN Nomor 81/KA/III/2017 tanggal 22 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Wilayah Bebas dari Korupsi BATAN Tahun 2017, yang mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun seleksi penetapan unit kerja calon Wilayah Bebas dari Korupsi;
 - b. Melakukan penilaian dan penetapan unit kerja calon Wilayah Bebas dari Korupsi;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap unit kerja yang diuji coba dan diterapkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi; dan
 - d. Menyusun laporan monitoring dan evaluasi secara periodik setiap akhir tahun.

Adapun susunan Tim Penilai Internal WBK tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Pengarah : Prof. Dr. Djarot Sulistio Wisnubroto
Penanggung Jawab : Ir. Falconi Margono Sutarto
Ketua : Dra. Mari Indriana, M.Si
Sekretaris : Wasgiyono, SH
Anggota : 1. Lestari Widowati
2. Zulfiyandi, A.Md
3. Erni Sofriyani, SE
4. Dra. Asri Lestari
5. Jayadi, S.Sos
6. Joko Waluyo, S.St
7. Ir. Sugiyanto
8. Cahyana, ST
9. Dandung Nurhono, S.Sos
10. Agus Rakhim, ST
11. Kriswanto, SE
12. Dwi Rahardjo, SH, MM
13. Enrico E.Siagian, SE, MH
14. Tanti Susanti, M.AK
15. Feri Kustiani, SE
16. Asridah
17. Septiyani Ikha Purnamasari, S.St
18. Ety Murniasih, A.Md
19. Kusriani.

- 4) Sesuai surat undangan nomor 106/ISP2/WP00/03/2017 tanggal 15 Maret 2017, Tim Penilai Internal inspektorat telah mengadakan rapat persiapan penilaian mandiri unit kerja menggunakan yang dihadiri oleh PTLR, PDL, PRSG, PPIKSN dan PSTNT.
- 5) Telah dilakukan verifikasi data dukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE) terhadap 3 unit kerja calon WBK yaitu PSTNT, PRSG dan PPIKSN.
- 6) Sesuai surat undangan nomor 175/ISP2/WP00/06/2017 tanggal 9 Juni 2017, telah dilaksanakan rapat koordinasi WBK antara tim penilai internal dengan unit kerja calon WBK dengan hasil LKE sebagai berikut :

No	Unit Kerja	Kriteria Pengungkit	Kriteria Hasil	Nilai Total
1	PTLR	89,79	89,53	89,69
2	Pusdiklat	86,99	84,38	85,94
3	PRSG	84,57	85,59	84,98
4	PSTNT	84,53	86,03	85,13
5	PPIKSN	81,58	86,22	83,44

- 7) Pada tanggal 15 Juni 2017 telah dilaksanakan rapat mengundang nara sumber dari Kementerian PAN&RB terkait persiapan penilaian PMPRB, WBK dan evaluasi LAKIN.
- 8) Sesuai surat Kepala BATAN nomor B.6398/KA.BATAN/WP.00.01/07/2017, tanggal 20 Juli 2017, BATAN telah mengusulkan 5 Unit Kerja ke Kementerian PAN dan RB untuk dinilai dan diverifikasi sebagai unit kerja berpredikat WBK tahun 2017.
- 9) Tanggal 27 November 2017, Kemenpan memberitahukan bahwa dari 5 unit kerja yang diusulkan akan dilakukan verifikasi lapangan 2 unit kerja yaitu PTLR dan Pusdiklat yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 November 2017 namun dibatalkan karena unit kerja sudah memiliki jadwal kegiatan yang tidak dapat dirubah.
- 10) Tanggal 7 Desember 2017 dilaksanakan penilaian survey persepsi korupsi untuk unit kerja PTLR yang dilaksanakan di lantai 6 kantor pusat BATAN yang dihadiri oleh 19 responden dan kemudian dilengkapi dengan survei melalui telp kepada responden lainnya untuk melengkapi jumlah minimal 30 responden.
- 11) Berdasarkan surat undangan KemenpanRB Nomor B/248/PW.04/2017 tanggal 5 Desember 2017, PTLR mendapatkan undangan untuk menerima penghargaan unit kerja berpredikat WBK untuk tahun 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2017 di hotel Bidakara Jakarta selatan. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Pusat PTLR, Kepala Jaminan Mutu dan perwakilan dari Inspektorat.
- 12) Berdasarkan surat undangan nomor 892/SU/OT02/12/2017, tanggal 13 Desember 2017, telah dilaksanakan exit meeting penilaian kemenpan RB pada tanggal 27 Desember 2017.

Kendala yang dihadapi : Tidak ada kendala

Foto kegiatan Verifikasi WBK oleh Kemen PAN dan RB di PRSG



II.1.2 Laporan Hasil Pengawasan di BATAN

Penanggungjawab Kriswanto, SE, yang terdiri atas 9 komponen yaitu :

II.1.2.1. Laporan Penerapan SPIP di Batan

Penanggungjawab : Retnani Dwi Angganingsih, SE

Anggaran : Rp. 38.151.000,-

Realisasi : Rp. 36.110.000,- (94,65%)

Realisasi fisik kegiatan sebesar 100 %.

Uraian Hasil Pelaksanaan kegiatan :

Capaian kegiatan Penerapan SPIP di BATAN sampai dengan akhir Tahun 2017 adalah 100% dari target 100%. Hasil dan pembahasan kegiatan Penerapan SPIP di BATAN sampai dengan akhir Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Triwulan	Tahapan	Indikator Keberhasilan	Hasil
I	Pembentukan tim evaluasi	Terbentuknya tim evaluasi	<ul style="list-style-type: none">- Telah dibentuk tim evaluasi yang beranggotakan seluruh Auditor Inspektorat termasuk Auditor Kepegawaian.- Tersusunnya jadwal evaluasi.- Terkumpulnya data dan bahan evaluasi, yaitu laporan RTP semua Kedeputian dan Laporan FGD Penilaian Risiko Unit kerja PAIR, PTRR, PTBGN dan BU.
	Menyusun program kerja dan pembagian tugas	Tersusunnya program dan jadwal	
	Menyiapkan data dan bahan (kertas kerja evaluasi dan laporan RTP unit kerja)	Terkumpulnya data dan bahan	
II	Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan SPIP tingkat instansi di unit kerja PAIR, PTRR, PTBGN, dan BU.	Terlaksananya evaluasi SPIP tingkat instansi di unit kerja PAIR, PTRR, PTBGN, dan BU.	<ul style="list-style-type: none">- Diterbitkannya Perka BATAN No. 8 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 214/KA/XI/2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Badan Tenaga Nuklir Nasional- Dilaksanakan sosialisasi Perka BATAN No. 8 Tahun 2017 kepada seluruh Auditor Inspektorat.
III	Penyusunan laporan hasil evaluasi penyelenggaraan SPIP di unit kerja PAIR, PTRR, PTBGN dan BU.	Tersusunnya simpulan hasil evaluasi penyelenggaraan SPIP di tingkat unit kerja PAIR, PTRR, PTBGN dan BU.	<ul style="list-style-type: none">- Dilaksanakan evaluasi penyelenggaraan SPIP di tingkat unit kerja dan tingkat kegiatan pada unit kerja PAIR, PTRR, PTBGN dan BU.- Diperolehnya simpulan hasil evaluasi penyelenggaraan SPIP di tingkat unit kerja dan tingkat kegiatan pada unit kerja PAIR, PTRR, PTBGN dan BU.
IV	Penyusunan laporan hasil evaluasi penyelenggaraan SPIP di unit kerja PAIR, PTRR, PTBGN dan BU.	Tersusunnya laporan hasil evaluasi penyelenggaraan SPIP di unit kerja PAIR, PTRR, PTBGN dan BU.	<ul style="list-style-type: none">- Diterbitkan laporan hasil evaluasi penyelenggaraan SPIP unit kerja:<ul style="list-style-type: none">a. Biro Umum dengan Nomor 04/ISP.A/LHE-SPIP/XI/2017 tanggal 14 Nopember 2017.b. PTBGN dengan Nomor 05/ISP.D/LHE-SPIP/XI/2017 tanggal 30 Nopember 2017.c. PAIR dengan Nomor 06/ISP.C/LHE-SPIP/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017.d. PTRR dengan Nomor 07/ISP.B/LHE-SPIP/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017.

Kendala yang dihadapi :

- Pemotongan anggaran yang cukup besar membuat target kegiatan harus direvisi.
- Pada saat Tim melaksanakan evaluasi SPIP di unit kerja, bukti dukung yang diperlukan belum disiapkan seluruhnya oleh unit kerja.

Cara mengatasi kendala:

Melakukan koordinasi dengan unit kerja sebelum melakukan evaluasi dan menyediakan waktu yang cukup agar unit kerja yang akan dievaluasi dapat menyiapkan bukti dukung yang diperlukan saat evaluasi.

II.1.1.2 Laporan Penilaian Kinerja Unit Kerja di BATAN

Penanggungjawab : Tanti Susanti. M. Ak
 Anggaran : Rp. 27.310.000,-
 Realisasi : Rp. 27.055.000,-(99,07%)
 Realisasi fisik kegiatan sebesar 100 %.

Uraian Hasil Pelaksanaan kegiatan :

Capaian kegiatan Penilaian Kinerja melalui PMPRB sampai dengan akhir Tahun 2017(realisasi) adalah 100% dari target 100%.Hasil dan pembahasan kegiatan Penilaian Kinerja melalui PMPRB sampai dengan akhir Tahun 2017 adalahsebagai berikut :

Uraian pelaksanaan kegiatan

No.	Kegiatan	Uraian	Hasil
Triwulan I – Tersusunnya ST Tim PMPRB, diperolehnya program, jadwal kegiatan, serta data awal PMPRB			
1.	Tersusunnya SK Tim PMPRB	Menyusun dan menyampaikan draft SK. Tim PMPRB ke Bagian Ortala BSDM	<ul style="list-style-type: none"> • Diterbitkannya SK Ka. BATAN untuk Tim PMPRB No. 35/KA/II/ 2017 • Diperolehnya program dan jadwal kegiatan PMPRB
2.	Diperolehnya rumusan program dan jadwal kegiatan PMPRB	Menyusun program dan jadwal kegiatan PMPRB	<ul style="list-style-type: none"> • Diperolehnya laporan kemajuan RB dari Pokja RB dan Unit Kerja di BATAN
3.	Diperolehnya data awal PMPRB	<ul style="list-style-type: none"> • Mengumpulkan laporan RB dari Pokja RB dan Unit Kerja • Melakukan rapat koordinasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya koordinasi intern tim PMPRB di Inspektorat
Triwulan II – Diperolehnyahasilpenilaiankinerjamelalui PMPRB tahap 1, 2 dan 3 secara online			
1.	Tersusun dan terinputnya LKE PMPRB Tahap 1 (secara online)	<ul style="list-style-type: none"> • Mengisi LKE dan Rencana Aksi secara online Tahap 1 • Menyiapkan data dukung 	<ul style="list-style-type: none"> • Diperolehnya LKE PMPRB Tahap 1, 2 dan 3 dengan nilai indeks RB 88,78
2.	Diperolehnya hasil survey	<ul style="list-style-type: none"> • Penyebaran kuesioner survey 	<ul style="list-style-type: none"> • Diperolehnya hasil

	internal PMPRB untuk kriteria Hasil	internal kesatker dengan batas akhir pengembalian ke Inspektorat <ul style="list-style-type: none"> • Penghitungan hasil kuesioner survey internal • Hasil survey internal adalah 4,35 dari skala 5 • Hasil survey eksternal menggunakan nilai yang sebelumnya yaitu 3,21 dari skala 4 	perhitungan kuesioner survey internal <ul style="list-style-type: none"> • Diperolehnya Berita Acara pengiriman LKE PMPRB keKemenPAN RB.
3.	Tersusun dan terinputnya LKE PMPRB Tahap 2 (secara online)	Tim PMPRB dan Ketua Pokja RB mengisi LKE PMPRB secara online Tahap 2 (pengisiannilai, bukti dan rencana aksi) sesuai dengan progress terbaru dari Laporan Tim RB BATAN dan Laporan RB Unit Kerja	
4.	Pengiriman LKE PMPRB Online ke MENPAN RB Tahap 3 (secara online)	<ul style="list-style-type: none"> • Koreksi LKE PMPRB Online oleh Sestama dan pengiriman kembali ke Inspektur • Pengiriman LKE PMPRB ke Sestama • Pengiriman LKE PMPRB ke KEMENPAN RB 	
5.	Permintaan dokumen bukti RB ke Tim Pokja RB	Mengirimkan Surat permohonan pengumpulan data RB ke Tim Pokja RB	
Triwulan III – Terlaksananya pemantauan RB dan diperolehnya dokumen RB			
1.	Terlaksananya pemantauan pelaksanaan RB dan rencana aksi pelaksanaan RB dan rencana aksi PMPRB	Terlaksananya pemantauan pelaksanaan RB dan rencana aksi PMPRB	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya rapat koordinasi Tim PMPRB dan RB • Diperolehnya laporan Monev RB BATAN
2.	Diperolehnya dokumen kemajuan RB dari masing-masing pokja RB	Diperolehnya dokumen kemajuan RB dari masing-masing pokja RB	
No.	Kegiatan	Uraian	Hasil
Triwulan IV – Terlaksananya evaluasi PMPRB dan diperolehnya laporan PMPRB			
1.	Terlaksananya evaluasi PMPRB	Terlaksananya evaluasi PMPRB oleh Kementerian PAN RB	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya evaluasi PMPRB oleh Kementerian PAN RB • Diperolehnya laporan PMPRB
2.	Diperolehnya laporan PMPRB	Diperolehnya laporan PMPRB dan disampaikan kepada Pimpinan	

Kendala yang dihadapi

Tidak ada kendala.

Foto kegiatan Pengisian online tahap III PMPRB



II.1.1.3 Laporan Evaluasi LAKIN

Penanggungjawab : Ririn Yekti Rahayuningsih, SE.
 Anggaran : Rp. 69.554.000,-
 Blokir : Rp. 6.010.000,-
 Realisasi : Rp. 63.528.600,- (91,34%)
 Realisasi fisik kegiatan sebesar 100 %.

Uraian Hasil Pelaksanaan kegiatan :

1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal BATAN

Rangkuman hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2016 terhadap 4 (empat) eselon I dan 23 (dua puluh tiga) eselon II di BATAN ditampilkan sebagai berikut:

Tabel Rangkuman Hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Internal BATAN per komponen/sub komponen

Komponen/Sub Komponen		Nilai Total Rata-Rata	Persentase Capaian
A. Perencanaan Kinerja	(30%)	27.39	91.30 %
I. Perencanaan Strategis	(10%)	9.25	
II. Perencanaan Kinerja Tahunan	(20%)	18.13	
B. Pengukuran Kinerja	(25%)	22.75	91.00%
I. Pemenuhan Pengukuran	(5%)	5.00	
II. Kualitas Pengukuran	(12.5%)	12.42	
III. Implementasi Pengukuran	(7.5%)	5.34	
C. Pelaporan Kinerja	(20%)	17.93	89.65%
I. Pemenuhan Pelaporan	(4%)	3.74	
II. Penyajian Informasi Kinerja	(10%)	9.32	
III. Pemanfaatan Informasi Kinerja	(6%)	4.87	
D. Evaluasi Internal	(15%)	10.23	68.20%
I. Pemenuhan Evaluasi	(3%)	2.25	
II. Kualitas Evaluasi	(8%)	5.26	
III. Pemanfaatan Evaluasi	(4%)	2.72	
E. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	(10%)	7.41	74.10%
Kinerja yang Dilaporkan (Output)	(10%)	7.41	
Jumlah		85.71	

Berdasarkan data Rangkuman Hasil penilaian akuntabilitas kinerja eselon I dan II per komponen/sub komponen di BATAN dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja umumnya sangat memuaskan, dengan nilai rata – rata 27.39 dari nilai maksimal 30.
2. Pengukuran Kinerja umumnya sangat memuaskan, dengan nilai rata – rata 22.75 dari nilai maksimal 25.
3. Pelaporan Kinerja umumnya memuaskan, dengan nilai rata – rata 17.93 dari nilai maksimal 20.
4. Evaluasi Internal umumnya baik, dengan nilai rata – rata 10.23 dari nilai maksimal 15.
5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi umumnya sangat baik, dengan nilai rata – rata 7.41 dari nilai maksimal 10.

Dari kelima komponen tersebut diperoleh nilai akuntabilitas kinerja eselon I dan II memuaskan dengan nilai rata-rata **85.71** .

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal BATAN Tahun 2016, kemajuan yang telah dicapai adalah sebagai berikut:

1. Telah memiliki dokumen Renstra yang memuat tujuan, indikator kinerja sasaran, target tahunan, Matriks Kinerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan, dan telah direviu secara berkala.
2. Tujuan, sasaran, dan target kinerja telah memenuhi kriteria SMART dan berorientasi hasil.
3. Dokumen Renstra telah digunakan dalam penyusunan dokumen rencana kinerja tahunan dalam bentuk matriks kinerja tahunan dan Perjanjian Kinerja (PK).
4. Dokumen PK yang disusun telah menyajikan IKU dan selaras dengan dokumen Renstra serta digunakan dalam dokumen pengajuan anggaran.
5. Rencana aksi atas PK telah disusun dan mencantumkan target secara periodik.
6. Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja dan informasi pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan dengan menggunakan teknologi informasi, dan dilakukan secara berkala.
7. Terdapat indikator kinerja individu yang mengacu pada IKU dan pengukuran kinerja telah dilakukan secara berjenjang.
8. Laporan Kinerja tahun 2016 telah disusun dan disampaikan tepat waktu serta menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan berikut analisisnya.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka meningkatkan implementasi SAKIP antara lain:

1. Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan, namun belum didukung dengan SOP atau mekanisme monitoring Renstra.
2. Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan capaian kinerja namun belum dijadikan dasar untuk pemberian reward dan punishment.
3. Rencana aksi atas kinerja belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya secara berkala dan belum dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan.
4. IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk penilaian kinerja pegawai, belum dijadikan dasar pemberian insentif dan disinsentif, serta dasar promosi atau kenaikan/penurunan peringkat.
5. Evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi belum sepenuhnya dilaksanakan dan hasilnya belum disampaikan/dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan
6. Pemantauan rencana aksi belum sepenuhnya memberikan rekomendasi perbaikan

perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan.

2. Evaluasi Program/Kegiatan BATAN

Dalam mencapai tujuan, sebagaimana dalam dokumen Renstra BATAN 2015-2019, BATAN menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yaitu:

- Sasaran 1: Diakuinya BATAN sebagai lembaga unggulan iptek nuklir di tingkat nasional maupun regional
- Sasaran 2: Meningkatnya kualitas dan daya saing hasil penelitian, pengembangan dan perekayasa iptek nuklir
- Sasaran 3: Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pendayagunaan hasil penelitian, pengembangan dan perekayasa iptek nuklir
- Sasaran 4: Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan

Untuk mencapai 4 (empat) sasaran tersebut, BATAN melaksanakan 2 (dua) program, yaitu :

1. Program Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan Radiasi BATAN.
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BATAN.

Masing-masing program terdiri dari 15 (lima belas) kegiatan teknis dan 8 (delapan) kegiatan dukungan yang dilaksanakan oleh 23 (duapuluh tiga) unit kerja sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional dan Peraturan Kepala BATAN No.14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja BATAN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BATAN Nomor 16 Tahun 2014.

Program dan kegiatan BATAN tersebut masih selaras dengan kebijakan pemerintah melalui BAPPENAS serta proses penganggaran di Kementerian Keuangan dengan telah ditetapkannya Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) BATAN 2015-2019, Dari hasil evaluasi terhadap program dan kegiatan BATAN, disimpulkan bahwa kedua program tersebut di atas yang telah dilaksanakan BATAN, beserta kegiatan-kegiatan di bawahnya masih relevan dan perlu terus dilaksanakan untuk memenuhi target-target yang telah diperjanjikan dalam dokumen Renstra BATAN 2015-2019, serta RPJMN 2015-2019.

Kendala yang dihadapi : Tidak ada kendala
Foto Kegiatan Evaluasi LAKIN BSDMO



II.1.2.4 Reviu RKA Unit Kerja Tahun 2018

Penanggungjawab : Ramsi Pascoal. S.Komp.
Anggaran : Rp. 60.418.000,-
Realisasi : Rp. 60.318.000,- (99,83%)
Realisasi fisik kegiatan sebesar 100 %.

Uraian Hasil Pelaksanaan kegiatan :

Tujuan reviu RKA-K/L oleh APIP K/L adalah untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan, bahwa informasi dalam RKA-K/L sesuai dengan RKP, Renja K/L dan Pagu Anggaran serta kesesuaian dengan standar biaya dan kaidah-kaidah penganggaran lainnya serta telah dilengkapi dengan dokumen pendukung RKA-K/L. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka apabila reviu menemukan kelemahan dan/atau kesalahan dalam penyusunan RKA-K/L, maka pereviu berkewajiban untuk menyampaikan kepada unit penyusun anggaran untuk segera dilakukan perbaikan/penyesuaian. Dengan demikian, secara garis besar dapat dikatakan bahwa adanya keterlibatan API K/L dalam meneliti RKA-K/L adalah untuk meningkatkan kualitas perencanaan K/L dan menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran sebagai quality assurance.

1. Penyusunan pembentukan TIM Reviu RKA Unit Kerja BATAN Tahun 2018 dengan susunan Tim Sementara sebagai berikut :\

a) TIM A

Pengendali Teknis : Chaerudin, SE
Ketua Tim : Feri Kustiani, SE
Anggota Tim : - Ririn Yekti Rahayuningsih, A.Md
- Latifah
- Aditya Ade Nurdianto, S.Pd

b) TIM B

Pengendali Teknis : Enrico Endy Siagian, SE, MH
Ketua Tim : Wasgoyono SH
Anggota Tim : - Retnani Dwi Angganingsih, SE
- Lisda
- Asridah
- Ety Murniasih, A.Md

c) TIM C

Pengendali Teknis : Ramsi Pascoal, S.Kom
Ketua Tim : Tanti Susanti, M. Ak
Anggota Tim : - Andes Goutama, S,Si MM
- Epi Woro Kartini
- Septiyanti Ikha Purnamasari, S.ST

2. Terlaksananya Revisi DIPA hasil Spending Reviu 23 Unit Kerja BATAN

3. Terlaksananya Revisi DIPA STTN dan PSTA

4. Terlaksananya Reviu Self Bloking sebesar Rp. 38 Milyar

5. Jadwal Pelaksanaan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Unit Kerja BATAN tahun 2018 berdasarkan Pagu Anggaran tahun 2018 akan dilaksanakan di akhir bulan Juli 2017 Sedangkan Untuk pelaksanaan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Unit Kerja BATAN tahun 2018 berdasarkan alokasi anggaran tahun 2018 dilaksanakan pada bulan oktober 2017

6. Terlaksananya Reviu RKA 23 Unit Kerja BATAN berdasarkan Pagu Indikatif.

7. Hasil Penajaman Reviu RKA Unit kerja BATAN dengan DJA sebagai berikut :

Hal-hal yang didiskusikan dan perlu mendapat perhatian untuk ditindaklanjuti dalam rapat koordinasi dimaksud sebagai berikut:

- 1) Output-output Prioritas Nasional, Janji Presiden, dan Tematik APBN
 - a. Pada Prioritas Nasional terdapat perbedaan penandaan anggaran sebesar Rp115.651.000,00 pada bidang prioritas kesehatan dan energi antara Dokumen Renja dengan Dokumen RKA-K/L, terhadap perbedaan tersebut BATAN agar melakukan perbaikan pada Renja K/L melalui aplikasi KRISNA, selanjutnya menjadi bahan update referensi pada aplikasi RKA-K/L.
 - b. Terdapat penandaan anggaran Janji Presiden yang tidak sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) dan Pengesahan DIPA pada Satker Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir (STTN). Terhadap hal tersebut BATAN agar melakukan perbaikan pada Renja K/L melalui aplikasi KRISNA.
 - c. Terdapat penandaan anggaran Tematik APBN bidang infrastruktur yang tidak tepat pada output Biro Umum. Terhadap hal tersebut BATAN agar melakukan perbaikan pada Renja K/L melalui aplikasi KRISNA.

- 2) Output-output Prioritas K/L atau Inisiatif Baru atau Tambahan Belanja hasil Pembahasan Berdasarkan surat Kepala BATAN Nomor B-1861/KA BATAN/KU 00/02/2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang Penyampaian Inisiatif Baru BATAN TA 2018, Kepala BATAN menyampaikan usulan tambahan anggaran untuk tahun 2018 sebesar Rp572.581.000.000,00. Terhadap usulan tersebut setelah dilakukan identifikasi di RKA-K/L Pagu Anggaran 2018 terdapat beberapa usulan yang dipenuhi seluruhnya, dipenuhi sebagian, dan tidak dipenuhi dengan rincian terlampir.
- 3) Output Baru, kebutuhan Belanja Operasional, dan Belanja Pegawai.
 - a. Terdapat 16 output baru yang akan berpengaruh terhadap penyesuaian dokumen renstra BATAN.
 - b. Terdapat kenaikan kebutuhan belanja LTGA akibat revitalisasi dan pengadaan peralatan pada satker BATAN yang berada di Serpong, Pusat Reaktor Serba Guna.
 - c. Belanja pegawai dialokasikan untuk 2.507 pegawai BATAN namun belum termasuk tambahan pegawai baru hasil penerimaan tahun 2017 sebanyak 98 orang. Selain itu, terdapat rencana perpindahan Loka Jepara dari yang sebelumnya berada di bawah koordinasi PKSEN menjadi STTN, hal tersebut akan mengakibatkan perpindahan aset, pegawai sebanyak 14 orang, dan pendanaannya.

- 4) Sinkronisasi RK-BMN dengan RKA-K/L Pagu Anggaran TA 2018 Pengadaan Barang Milik Negara (BMN) yang sudah memiliki SBSK berpedoman pada hasil penilaian RK-BMN TA 2018.

8. Terlaksananya Reviu RKA 23 Unit Kerja BATAN berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran 2018.

Berdasarkan hasil Penelitian dan Reviu RKA-K/L yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Terdapat alokasi anggaran untuk kegiatan kontrak jamak berupa proyek Akselerator Elektron Energi Tinggi (AEET) kapasitas 10 MeV sebesar Rp. 19.200.000.000,- yang masih diblokir sampai dengan Rekomendasi dari Kementerian PUPR dan persetujuan Kontrak Tahun Jamak dari Menteri Keuangan diterbitkan.

- 2) Masih terdapat Kegiatan-Kegiatan yang tidak berkaitan dengan tugas dan Fungsi Unit Kerja.
- 3) Pengadaan pekerjaan gedung dan bangunan, dan belanja penambahan nilai gedung dan bangunan belum melampirkan Surat perhitungan kebutuhan biaya dari KemenPUPERA atau dinas PU Setempat
- 4) Belanja modal peralatan dan mesin belum dilengkapi dengan data dukung berupa brosur/spesifikasi, harga dan e-katalog.
- 5) Masih terdapat Belanja Modal yang belum melengkapi dengan bukti dukung seperti spesifikasi, harga alat dan TOR/KAK tersendiri.
- 6) Pada Umumnya penyusunan KAK/TOR belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- 7) Belum dilakukan efisiensi perjalanan dinas Es.IV/Gol.III karena frekuensi terlalu banyak dan sesuaikan dengan kebutuhan.
- 8) Perjalanan dinas biasa belum dilampiri dengan Rincian SPPD.
- 9) Perjalanan dinas luar negeri belum memperhitungkan biaya uang harian perjalanan luar negeri sesuai dengan klasifikasi golongan dalam SBM dan biaya tiket sesuai dengan ketentuan SBM dan dilengkapi TOR/KAK tersendiri.
- 10) Terdapat perjalanan dinas tidak layak dialokasikan pada Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan dan belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin.
- 11) Pembuatan Modul Software rinciannya hanya berupa perjalanan dinas tidak layak dianggarkan.
- 12) Belanja Biaya Pemeliharaan Elevator (Lift) dalam RKBMN hanya dianggarkan untuk 3 unit sedang dalam RKA dan RAB dianggarkan untuk 4 unit.
- 13) Unit Kerja mengalokasikan Pengadaan Kendaraan dinas roda 4 Eselon 1, seharusnya dianggarkan di Biro Umum.
- 14) Unit Kerja mengalokasikan Pengadaan kendaraan dinas roda 4 Eselon II tidak layak dianggarkan karena belum tercantum dalam RKBMN dan tidak sesuai SBM.
- 15) Terdapat pemeliharaan HKI (paten granted dan PVT) belum dilengkapi dengan data dukung daftar patennya.
- 16) Terdapat biaya perawatan fire alarm dan paging tidak seharusnya di alokasikan pada kegiatan laporan Pengelolaan Pengamanan Nuklir
- 17) Masih terdapat belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin tidak layak di anggarakan karena belum masuk dalam RKBMN 2018.
- 18) Belanja modal peralatan mesin berupa Menara meteorology dan peralatannya akan dialokasikan ke output RDE.
- 19) Masih terdapat Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa komputer dan notebook tidak sesuai dengan standar kebutuhan.
- 20) Masih terdapat belanja modal peralatan dan mesin dibawah nilai kapitalisasi.
- 21) Pengadaan seragam BATAN masih di atas HSS BATAN
- 22) Terdapat sewa bus belum menjelaskan lokus.
- 23) Penyusunan RAB tidak sesuai dengan ketentuan
- 24) Pembebanan MAK tidak sesuai ketentuan
- 25) Pada umumnya honorarium narasumber belum dibuatkan surat keputusan
- 26) Belanja Jasa Profesi untuk honorarium narasumber Eselon II tidak sesuai SBM
- 27) Pada umumnya Surat Keputusan Tim/ Panitia kegiatan belum dibuat
- 28) Terdapat honor narasumber pada belanja modal tidak layak dialokasikan.
- 29) Terdapat Honorarium dan paket meeting penyusunan LAK reaktor pada kegiatan Strategic plan dan decommissioning plan reaktor kartini tidak layak dialokasikan pada Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan.
- 30) Terdapat beberapa unit kerja masih mengalokasikan honorarium Pokja ULP seharusnya tidak layak dianggarkan.
- 31) Pembayaran honor operasional satuan kerja untuk pengelola SAI pada UAPPA dan UAPPB Tingkat Eselon I seharusnya tidak dianggarkan karena sudah menganggarkan untuk UAPA dan UAPB Tingkat kementerian/lembaga.
- 32) Terdapat biaya kalibrasi yang tidak dapat anggarkan sesuai dengan surat edaran Sestama mengenai pembebasan biaya PNBPN.

Kendala yang dihadapi : Tidak ada kendala

Foto Kegiatan Reviu RKA Unit Kerja



II.1.2.5 Laporan Reviu Laporan Keuangan

Penanggungjawab : Feri Kustiani, SE
Anggaran : Rp. 54.810.000,-
Realisasi : Rp. 54.333.496,- (99,13%)
Realisasi fisik kegiatan sebesar 100 %.

Uraian Hasil Pelaksanaan kegiatan :

Pada akhir Tahun 2017 ini, reviu laporan keuangan memiliki target 100% dengan indikator keberhasilan adalah tersusunnya Laporan Hasil Reviu. Capaian kegiatan Reviu Laporan Keuangan sampai dengan akhir Tahun 2017 telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 100%.

Hasil yang telah dicapai sampai dengan triwulan IV Tahun 2017 dijabarkan sebagai berikut:

Tri-wulan	Sasaran	Hasil yang dicapai sd Triwulan II	Keterangan
I	Terbentuknya Tim Reviu	Telah terbentuknya Tim Reviu	Surat Tugas Inspektur BATAN Nomor: ST-03/ISP/02/2017
	Tersusunnya jadwal rencana kerja	Telah tersusunnya jadwal rencana kerja melalui rapat koordinasi dengan Biro Umum, yaitu FGD 1 tanggal 9-13 Januari 2017 dan FGD 2 tanggal 30 Januari - 3 Februari 2017	Telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan telah tersusunnya catatan hasil reviu dari FGD 1 dan FGD 2
	Tersusunnya kertas kerja reviu LK Semester II Tahun 2016 un-audited	Telah dilaksanakan reviu laporan keuangan BATAN Semester II Tahun 2016 un-audited	Dengan hasil kertas kerja reviu konsolidasi manual seluruh satker dan BATAN
	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu dan	Telah tersusunnya Laporan Hasil Reviu (LHR) Laporan Keuangan BATAN Tahun	LHR Nomor: 01/ISP/LHR-LK/III/2017 Pernyataan Telah direviu

	pernyataan telah direviu	2016 (Un Audited) dan Pernyataan Telah direviu oleh Inspektur	dilampirkan dalam Laporan Keuangan BATAN Tahun 2016 (Un Audited)
II	Tersusunnya kertas kerja reviu LK Semester II Tahun 2016 audited Tersusunnya pernyataan telah direviu audited	Telah dilaksanakan reviu laporan keuangan BATAN Tahun 2016 Audited	dengan hasil kertas kerja reviu LK Tahun 2016 audited dan Pernyataan telah direviu yang dilampirkan dalam Laporan Keuangan BATAN Tahun 2016 Audited
III	Tersusunnya Kertas Kerja Reviu (untuk LK Semester I Tahun 2017) Tersusunnya Laporan Hasil Reviu dan Pernyataan Telah Direviu	Telah dilaksanakan reviu laporan keuangan BATAN Semester I Tahun 2017	dengan hasil kertas kerja reviu Laporan Keuangan Semester I Tahun 2017 dan Laporan Hasil Reviu Nomor: 02/ISP/LHR-LK/IX/2017 tanggal 13 September 2017 berikut Pernyataan telah direviu yang dilampirkan dalam Laporan Keuangan BATAN Semester I Tahun 2017
IV	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu	Telah dilaksanakan reviu Laporan Keuangan BATAN Triwulan III Komprehensif Tahun 2017	Dengan hasil berupa Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan BATAN Triwulan III Komprehensif Tahun 2017 Nomor: 03/ISP/LHR-LK/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017.

Kendala

Kegiatan reviu laporan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan yaitu mencapai 100%. Walaupun dalam pelaksanaannya tidak terdapat kendala dan hambatan, namun untuk ke depan nya kegiatan reviu laporan keuangan memerlukan koordinasi yang lebih intens dengan bagian penyusun laporan keuangan baik tingkat Satker maupun Lembaga agar reviu laporan keuangan yang dilakukan dapat tepat waktu dan tepat guna.

Foto Kegiatan Pelaksanaan pendampingan penyusunan dan sekaligus reviu Laporan Keuangan Semester II Tahun 2016 Un Audited tingkat Satker pada FGD 1 di kawasan Serpong



II.1.2.6 Laporan Evaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

Penanggungjawab : Latifah.
 Anggaran : Rp. 21.230.000,-
 Realisasi : Rp. 21.204.019,- (99,88%)
 Realisasi fisik kegiatan sebesar 100 %.

Uraian Hasil Pelaksanaan kegiatan :

Capaian kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Tindak Lanjut Temuan BPK sampai dengan akhir Tahun 2017 (realisasi) adalah 100% dari target 100%. Hasil dan pembahasan kegiatan tindak lanjut Temuan Tahun 2017 sampai dengan akhir Tahun 2017 sebagai berikut:

Tri wulan	Tahapan	Indikator Keberhasilan	Hasil
I	Melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut LHP BPK : koordinasi a. Rapat Koordinasi b. Pembentukan Tim c. Mengumpulkan data dan bahan bahan dari unit kerja dan Instansi terkait untuk bahan Tindak Lanjut	Terlaksananya Rapat Koordinasi	- Telah dibentuk tim evaluasi yang beranggotakan seluruh Auditor Inspektorat termasuk Auditor Kepegawaian. - Tersusunnya jadwal evaluasi. - Terkumpulnya data dan bahan evaluasi untuk pelaksanaan Tindak Lanjut Temuan BPK
		Terbentuknya Tim Tindak Lanjut Temuan BPK 2018	
		Terkumpulnya data dan bahan	
Tri wulan	Tahapan	Indikator Keberhasilan	Hasil
II	Melaksanakan evaluasi dan tindak - lanjut LHP BPK : dengan unit kerja dan Instansi a. Mengkompilasi sisa Tindak Lanjut terkait semester II tahun 2017 dengan temuan BPK untuk LK tahun 2018 b. Tersusunnya Laporan evaluasi dan tindak lanjut temuan BPK c. Penerbitan Laporan evaluasi dan tindak lanjut Semester I Tahun 2018 ke BPK untuk dibahas.	Terlaksananya kordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait.	- Diterbitkannya Laporan Evaluasi dan Tindak Lanjut Semster 1 tahun 2018

Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK pada BATAN sampai dengan Semester II Tahun 2017 sebagai berikut:

No.	Objek Pemeriksaan	Jml Temuan	Reko mendasi	Rekomendasi		Belum Ditindak lanjuti
				Sesuai	Belum sesuai dlm proses TL	
1	Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA 2017	12	29	20	9	-
2	Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA 2016	11	42	37	5	-
3	Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA 2015	10	28	27	1	-
4	Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA 2014	30	25	24	1	-

5	Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Kinerja BATAN 2013-2014	18	39	34	5	-
6	Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA 2013	18	48	46	2	-
8	Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA 2008	7	7	6	1	-

Kendala yang dihadapi : Tidak ada kendala

II.1.2.7 Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan

Penanggungjawab : Chaerudin, SE.
 Anggaran : Rp. 461.211.000,-
 Realisasi : Rp. 461.037.500,- (99,96%)
 Realisasi fisik kegiatan sebesar 100 %.

Uraian Hasil Pelaksanaan kegiatan :

Capaian kegiatan pemeriksaan sampai dengan bulan Desember tahun 2017 sebesar 100 % dari target yang direncanakan sebesar 100%. Hasil yang telah dicapai sampai dengan bulan Desember tahun 2017 sebagai berikut :

- Telah dilaksanakan pendampingan pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan BATAN tahun 2016 , kegiatan ini selesai pada minggu pertama bulan April 2017.
- Terlaksananya audit kinerja terhadap PSMN dengan Surat Tugas Kepala BATAN No.87/KA/02/2017 tgl 10 Pebruari 2017.
- Terlaksananya audit Kepegawaian terhadap PSMN dengan Surat Tugas Kepala BATAN No. 86/KA/02/2017 tgl 10 Pebruari 2017
- Terlaksananya audit kinerja terhadap PPIKSN dengan Surat Tugas Kepala BATAN No. 120/KA/03/2016 tgl 1 Maret 2016
- Terlaksananya audit Kepegawaian terhadap PPIKSN dengan Surat Tugas Kepala BATAN No. 122/KA/03/2017 tgl 1 Maret 2016
- Terlaksananya audit kinerja terhadap PTKMR dengan Surat Tugas Kepala BATAN No.272 /KA/05/2016 tgl 15 Mei 2016
- Terlaksananya audit Kepegawaian terhadap PTKMR dengan Surat Tugas Kepala BATAN No. 273/KA/05/2017 tgl 15 Mei 2016
- Terlaksananya audit Kinerja terhadap PTRKN dengan Surat Tugas Kepala BATAN No. 216/KA/04/2017 tgl 13 April 2016
- Terlaksananya audit Kepegawaian terhadap PTKRN dengan Surat Tugas Kepala BATAN No. 217/KA/04/2017 tgl 13 April 2016
- Terlaksananya audit Kinerja terhadap PRFN dengan Surat Tugas Kepala BATAN No. 333/KA/06/2017 tgl 15 Juni 2016
- Terlaksananya audit Kepegawaian terhadap PRFN dengan Surat Tugas Kepala BATAN No. 334/KA/06/2017 tgl 15 Juni 2017
- Terlaksananya audit Kinerja terhadap PAIR dengan Surat Tugas Kepala BATAN No. 431/KA/08/2017 tgl 22 Agustus 2016
- Terlaksananya audit Kepegawaian terhadap PAIR dengan Surat Tugas Kepala BATAN No. 432/KA/08/2017 tgl 22 Agustus 2017
- Terlaksananya audit Pengadaan Barang dan Jasa pada PSTNT dengan Surat Tugas Kepala BATAN Nomor . 519/KA/10/2017 tanggal 16 Oktober 2017
- Terlaksananya audit Pekerjaan Revitalisasi Sarana dan Prasarana pada PSTA dengan Surat Tugas Kepala BATAN Nomor . 520/KA/10/2017 tanggal 16 Oktober 2017
- Terlaksananya audit Pembangunan Gedung Dormitori dan pengadaan Iradiator Gamma STTN dengan Surat Tugas Kepala BATAN Nomor . 521/KA/10/2017 tanggal 16 Oktober 2017

Laporan Hasil Audit (LHA) Kinerja yang sudah diterbitkan sampai dengan bulan Desember 2017 adalah :

- LHA PSTA Nomor 012/ISP.C/III/2017 tanggal 2 Maret 2017
- LHA PKSEN Nomor 014/ISP.A/V/2017 tanggal 2 Mei 2017
- LHA PDK Nomor 015/ISP.B/V/2017 tanggal 12 Mei 2017
- LHA PAIR Nomor 017/ISP.C/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017
- LHA Kantor Pusat Nomor 019/ISP.C/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017
- LHA PSMN Nomor 001/ISP.B/VII/2017 tanggal 03 Juli 2017
- LHA PPIKSN Nomor 002/ISP.C/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017
- LHA PTKRN Nomor 06/ISP.A/XI/2017 tanggal 8 Nopember 2017
- LHA PRFN Nomor 07/ISP.C/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017

Laporan Hasil Audit (LHA) Kepegawaian yang sudah diterbitkan sampai dengan bulan Desember 2017 adalah :

- LHA STTN Nomor 009/ISP.D/0I/2017 tanggal 9 Januari 2017
- LHA PSTNT Nomor 010/ISP.D/0I/2017 tanggal 9 Januari 2017
- LHA PAIR Nomor 011/ISP.D/0I/2017 tanggal 16 Januari 2017
- LHA PKSEN Nomor 013/ISP.D/04/2017 tanggal 4 April 2017
- LHA PDK Nomor 016/ISP.D/V/2017 tanggal 29 Mei 2017
- LHA PAIR Nomor 018/ISP.D/VI/2017 tanggal 9 Juni 2017
- LHA PSMN Nomor 03/ISP.D/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017
- LHA PPIKSN Nomor 04/ISP.D/IX/2017 tanggal 18 September 2017
- LHA PTKRN Nomor 05/ISP.D/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017
- LHA PRFN Nomor 08/ISP.D/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017

Berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA) Kinerja dan Kepegawaian , jumlah temuan sesuai dengan klasifikasinya sebagai berikut :

KODE	JENIS TEMUAN PEMERIKSAAN	JUMLAH	TPL	TPB
01	Kasus yang merugikan negara.	0	0	0
02	Kewajiban menyetor kepada negara.	3	3	0
03	Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.	23	23	0
04	Pelanggaran terhadap prosedur dan tata kerja yang telah ditetapkan.	24	24	0
05	Penyimpangan dari ketentuan anggaran.	11	11	0
06	Hambatan terhadap kelancaran proyek.	0	0	0
07	Hambatan terhadap tugas pokok.	1	1	0
08	Kelemahan administrasi.	19	19	0
09	Ketidak lancaran pelayanan kepada masyarakat.	0	0	0
10	Temuan pemeriksaan lainnya.	2	2	0
JUMLAH		88	88	0

Keterangan :

- TPL = Temuan Pemeriksaan yang sudah ditindak lanjuti.
- TPB = Temuan Pemeriksaan yang belum ditindak lanjuti.

Kendala yang dihadapi : Tidak ada kendala

Foto Kegiatan Audit



II.1.2.8 Reviu Laporan Kinerja BATAN

Penanggungjawab : Epi Woro Kartini
Anggaran : Rp. 14.969.000,-
Realisasi : Rp. 14.935.000,- (99,77%)
Realisasi kegiatan fisik sebesar 100 %.

Uraian Hasil Pelaksanaan kegiatan :

1. Penyusunan rencana kegiatan Reviu Laporan Kinerja BATAN
 - 1.1. Pada tahap penyusunan dilakukan pembentukan Tim Reviu Laporan Kinerja sesuai Surat Tugas Inspektur Nomor 04/ISP/02/2017 – tanggal 7 Februari 2017, dengan susunan:

Pengendal Teknis : Ramsi Pascoal, S. Kom
Ketua Tim Reviu : Wasgiyono, SH
Anggota Tim : 1. Andes Goutama, S.Si.,MM.
2. Epi Woro Kartini
3. Asridah
4. Lisda, S.Kom
 - 1.2. Selanjutnya dilakukan *Entry Meeting* ke Unit Kerja Penyusun LAKIN BATAN untuk pendampingan penyusunan LAKIN BATAN dan penyiapan, pengumpulan dan pengolahan data/ bahan reviu Laporan Kinerja BATAN tahun 2016.
2. Pelaksanaan reviu atas draft Laporan Kinerja BATAN 2016 dengan menggunakan Kertas Kerja Reviu dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

- 2.1. Berdasarkan hasil reviu dilaksanakan konfirmasi dengan Tim Penyusun Laporan Kinerja BATAN dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Reviu Laporan Kinerja BATAN.

Selanjutnya dibuat Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja BATAN Tahun 2016 Nomor R.95/ISP.2/WP 00/03/2017 tanggal 02 Maret 2017 dan Pernyataan

Kendala yang dihadapi : Tidak ada kendala

II.1.2.9 Reviu Laporan Reviu BMN

Penanggungjawab : Enrico Endy Siagian, SE

Anggaran : Rp. 9.986.000,-

Realisasi : Rp. 8.952.000,- (89,65%)

Realisasi kegiatan fisik sebesar 100 %.

Uraian Hasil Pelaksanaan kegiatan :

Hasil penelitian RKBMN dari Biro Umum selaku Pengguna Barang (PB) diterima Inspektorat tanggal 27 Oktober 2017 dengan Nota Dinas Nomor 3081/UM1.2/PL0102/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017 perihal : Penyampaian Hasil Penelitian RKBMN TA 2017.

1. Dari hasil penelitian PB tersebut dilakukan Reviu BMN oleh Inspektorat untuk pengadaan TA. 2019 yang dilakukan pada tanggal 7-8 November 2017 terhadap terhadap 20 Kuasa Pengguna Barang (KPB), dilakukan di Kantor Pusat BATAN Lt.VI dengan metode wawancara dan konfirmasi langsung kepada 20 KPB (PTBBN, PTKRN, PTKMR, PRFN PTBGN PTLR, PSTNT, PSTBM, STTN, PKSEN, PSTA, PPIKSN, PRSG, PAIR, Inspektorat, PSMN, Kantor Pusat, PTRR, PDL, PDK) dengan menurunkan seluruh auditor dan terbagi dalam 3 (tiga) Tim Reviu seperti tabel dibawah ini:

Tabel 1. Jadwal Reviu RKBMN

REKAPITULASI REVIU RKBMN ANGGARAN TAHUN 2019									
No.	KPB	Tanggal		Tim A (Chaerudin)	Tim B (Enrico)	Tim C (Ramsi)	Tim A	Tim B	Tim C
1	PTBBN	Selasa 7 Nop 2017 09.00-11.00				Andes + Epi	STTN	PSTA	PSTNT
2	PTKRN			Angga + Adit			PRSG	PPIKSN	PTLR
3	PTKMR				Wasgi + Lisda		PRFN	PTBGN	PTBBN
4	PRFN			Feri + Latifah			ISP	PDL	PSTBM
5	PTBGN				Ririn + Asridah		PTKRN	PSMN	PAIR
6	PTLR						Tanti + Ety	PTRR	PTKMR
7	PSTNT	Selasa 7 Nop 2017 13.00-16.00				Andes + Epi	PKSEN	PDK	
8	PSTBM						Tanti + Ety		
9	STTN			Angga + Adit					
10	PKSEN			Feri + Latifah					
11	PSTA				Wasgi + Lisda				
12	PPIKSN				Ririn + Asridah				
13	PRSG	Rabu 8 Nop 2017 09.00-12.00		Angga + Adit					
14	PAIR					Andes + Epi			
15	Inspektorat			Chaerudin					
16	PSMN				Enrico				
17	BU						Tanti + Ety		
18	PTRR			Feri + Latifah					
19	PDL				Wasgi + Lisda				
20	PDK				Ririn + Asridah				
TOTAL :									

CATATAN : Untuk hari Selasa tanggal 7 Nopember 2017 Pengendali Teknis (Dalnis) membantu TIM nya masing-masing

2. Surat Tugas Reviu yang diterbitkan oleh Inspektur terdiri dari:
 - Tim A ST No. 334/ISP/10/2017, tanggal 27 Oktober 2017
 - Tim B ST No. 335/ISP/10/2017, tanggal 27 Oktober 2017
 - Tim C ST No. 336/ISP/10/2017, tanggal 27 Oktober 2017

3. Kesepakatan antara KPB dengan Inspektorat menghasilkan kesepakatan dituangkan dalam Catatan Hasil Reviu (CHR) yang harus ditindaklanjuti segera dan Inspektorat membuat CHR, Laporan Hasil Reviu, dan Pernyataan Telah Direviu yang di *upload* di Aplikasi SIMAN serta disampaikan ke Pengguna Barang (Biro Umum).
4. Pelaksanaan Reviu BMN mengalami keterbatasan anggaran berupa konsumsi, sehingga Inspektorat meminta bantuan Biro Umum untuk membantu *sharing* konsumsi dengan Nota Dinas Nomor 346/ISP2/PL0102/10/2017 tanggal 1 Nopember 2017.
5. Telah dilakukan Forum Penelaahan RKBMN Tahun 2019 dengan Kementerian Keuangan cq. Dierktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), surat undangan Nomor Und-99/KN/2017 tanggal 22 November 2017 yang dilakukan dari tanggal 4-5 Desember 2017. Forum tersebut dihadiri oleh DJKN beserta BATAN (Biro Umum, Inspektorat dan Biro Perencanaan).

Kendala yang dihadapi : Tidak ada kendala

II.1.3. Penyelenggaraan Dukungan Publik dan Birokrasi

Penanggungjawab : Indra Kurniawan
 Anggaran : Rp. 458.412.000,-
 Realisasi : Rp. 458.107.199,- (99,93%)
 Realisasi kegiatan fisik sebesar 100 %.

Uraian Hasil Pelaksanaan kegiatan :

Penyelenggaraan dukungan administrasi layanan perkantoran dalam rangka mendukung dan mengemban tugas pokok dan fungsi Inspektorat telah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Secara keseluruhan kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 458.412.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 458.107.199,- (99,93%), realisasi fisiknya sebesar 100%. Kegiatan ini terdiri dari 3 sub komponen antara lain :

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Kegiatan Dukungan
 - Anggaran : Rp. 25.185.000,-
 - Realisasi : Rp. 25.159.200,- (99,90%)
 - Realisasi Fisik : 100%
 - Hasil:
 Hasil dari sub komponen kegiatan ini adalah tersusunya program kerja Inspektorat tahun 2017 diantaranya Program Kegiatan Pemeriksaan Tahunan, Jadwal Pelaksanaan kegiatan dan tersusunya RKA KL Inspektorat tahun 2018 .
2. Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Administrasi Layanan yang terdiri dari beberapa sub sub komponen antara lain
 - a. Pendidikan dan pelatihan
 - b. Rapat-rapat koordinasi.

1. Pendidikan dan Pelatihan

Anggaran : Rp. 15.160.000,-
 Realisasi : Rp. 15.160.000,- (100%)
 Realisasi Fisik : 100%
 Hasil :

Pada tahun 2017 ada beberapa diklat penjejnangan fungsional yang telah dilaksanakan guna menunjang kemampuan dan ketrampilan auditor antara lain:

No	Nama Kegiatan & Bidang	Tempat & Waktu Penyelenggaraan	Penyelenggara	Nama Peserta
1.	Diklat Penjurangan Auditor Muda	Ciawi, 23 Februari s/d 11 Maret 2017	Pusdiklatwas BPKP Ciawi, Bogor	Andes Goutama
2	Diklat Penjurangan Auditor Ahli	Ciawi, 6 Maret s/d 21 Maret 2017	Pusdiklatwas BPKP Ciawi, Bogor	Ririn Yekti Rahayuningsih

2. Rapat rapat koordinasi

Anggaran : Rp. 279.513.000,-
 Realisasi : Rp. 279.365.239,- (99,95%)
 Realisasi Fisik : 100%
 Hasil:

Hasil dari Komponen kegiatan ini adalah terselenggaranya rapat rapat koordinasi, rapat Tim Kegiatan, baik internal maupun lintas satker.

3. Pengembangan mutu kelembagaan

Anggaran : Rp. 5.215.000,-
 Realisasi : Rp. 5.190.000,- (99,52%)
 Realisasi Fisik : 100%

Hasil dari Komponen kegiatan ini adalah :

LAPORAN KEGIATAN TIM JAMINAN MUTU INSPEKTORAT TAHUN 2017

BULAN	RENCANA	REALISASI	KETERANGAN
Januari	1. Pembentukan Tim Jaminan Mutu Inspektorat.	1. Telah dibentuk Tim Jaminan Mutu Inspektorat dengan Keputusan Inspektur Nomor 07/HK 00 07/ISP/I/2017 tgl. 4 Januari 2017	
Pebruari	2. Rapat Koordinasi Inspektorat 3. Rapat Kaji Ulang Manajemen	2-3. Pelaksanaan rapat koordinasi Inspektorat dan Rapat Kaji Ulang Manajemen tertunda karena kepadatan jadwal pendampingan audit LK BATAN oleh BPK.	
	4. Audit Eksternal dari PSMN dalam rangka surveilen. 5. Pembahasan hasil Audit Eksternal dari PSMN	4. Belum dilaksanakan oleh PSMN 5. Tidak dilaksanakan karena belum ada Audit Eksternal dari PSMN	
Maret-April-Mei	6. Tindakan perbaikan hasil audit eksternal.	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Inspektorat I dan Kaji Ulang Manajemen tanggal 17-18 Maret 2017. 6. Tidak dilaksanakan karena belum ada Audit Eksternal dari PSMN.	Notulen rapat Nomor: 002/ISP.2/IF 02/2017 tgl. 20 Maret 2017.
Juni	7. Revisi SOP Inspektorat dalam	7. Kegiatan Kaji Ulang Dokumen dilaksanakan pada bulan Juni	

	rangka Kaji Ulang Dokumen.	2017, dilakukan revisi terhadap 2 SOP yaitu SOP Audit Kinerja Nomor SOP 206/OT 01 02/ISP Revisi 3 tanggal 28 Januari 2015 dan SOP Reviu LAKIN BATAN Nomor SOP 11.002/OT 01 01/ISP Revisi 0 tanggal 08 April 2016.	
	8. Rapat Koordinasi Inspektorat II	8. Rapat Koordinasi Inspektorat II yang direncanakan dilaksanakan pada bulan Juli telah dilaksanakan pada tanggal 16-17 Juni 2017	Notulen rapat Nomor: 10/ISP.2/IF02/06/20 17 tgl. 19 Juni 2017.

BULAN	RENCANA	REALISASI	KETERANGAN
Juli	9. Rapat Koordinasi Inspektorat II	9. Telah dilaksanakan pada bulan Juni 2017	-
Agustus	10. Pembentukan Tim Pemeriksaan Internal	10. Belum dilaksanakan	-
Sept.	11. Pemeriksaan Internal.	11. Belum dilaksanakan	-
Oktober	12. Pembahasan hasil Pemeriksaan Internal. 13. Rapat Kaji Ulang Manajemen	12. Pemeriksaan Internal Inspektorat dilaksanakan pada tanggal 26-27 Oktober 2017, dengan Laporan Pemeriksaan Internal (terlampir), dan batas tindakan perbaikan terhadap temuan ketidaksesuaian pada tanggal 27 Desember 2017. 13. Kaji Ulang Manajemen dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2017 dengan agenda pembahasan questioner pementauan PSMN dan persiapan pelaksanaan pemeriksaan internal Inspektorat, dan kegiatan lain terkait pelaksanaan sistem manajemen Inspektorat.	Notulen rapat Nomor: 015/ISP.2/IF 02/2017 tgl. 9 Oktober 2017
Nopember	14. Perbaikan dokumen hasil Pemeriksaan Internal. 15. Rapat Kaji Ulang Manajemen	14. Revisi SOP Reviu RK-BMN Nomor: SOP 12/OT 01 02/ISP tg. 30-6-2016 15. Telah dilaksanakan pada bulan Oktober 2107. 16. Surveilen II oleh PSMN untuk Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Inspektorat telah dilaksanakan pada tanggal 9-10 November 2017, dengan temuan ketidaksesuaian yaitu: - Kategori 2 (Minor) sebanyak 6 buah; - Kategori 3 (Observasi) sebanyak 2 buah.	- - - Pembahasan tindakan perbaikan telah dilaksanakan pada tanggal 21 - 22 November 2017, sedangkan batas tindakan perbaikan untuk kategori 2 (Minor) pada tanggal 10 Januari 2018 dan kategori 3

			(Observasi) sampai dengan periode audit berikutnya.
Desember	17. Penyusunan Laporan Tim Jaminan Mutu 18. Rapat Koordinasi Inspektorat	17. Telah dilakukan penyusunan Laporan Kegiatan Tim Jaminan Mutu Inspektorat Tahun 2017. 18. Rapat Koordinasi Inspektorat dan Tinjauan Manajemen telah dilaksanakan pada tanggal 24-25 November 2017.	- Notulen rapat Nomor: 19/ISP.2/IF02/11/2017 tgl. 27 Nov.2017

4. Perawatan kendaraan roda 4

Anggaran : Rp. 77.100.000,-
 Realisasi : Rp. 77.099.900,- (100%)
 Realisasi Fisik : 100%

Hasil:

Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya perawatan 3 unit kendaraan roda 4 secara rutin,

5. Pengadaan Inventaris kantor

Anggaran : Rp. 25.000.000,-
 Realisasi : Rp. 24.983.860,- (99,94%)
 Realisasi Fisik : 100%

Hasil:

Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan inventaris kantor berupa printer, LCD dan Layar LCD, yang penggunaannya sangat mendukung dalam pelaksanaan kegiatan dukungan administrasi

6. Evaluasi/Laporan Kegiatan dan Anggaran

Anggaran : Rp. 31.239.000,-
 Realisasi : Rp. 31.149.000,- (99,71%)
 Realisasi Fisik : 100%

Hasil:

Hasil dari Komponen kegiatan ini adalah tersusunya Draft Laporan keuangan, Laporan Triwulan IV, Laporan realisasi anggaran, Laporan Tahunan dan Laporan Capaian Kinerja.

II.1.4 Layanan Perkantoran

Penanggungjawab : Indra Kurniawan
 Anggaran : Rp 4.169.950.000,-
 Realisasi : Rp. 4.068.915.058 (97,58%)
 Realisasi kegiatan fisik sebesar 100 %.
 Kendala yang dihadapi : Tidak ada kendala

Uraian Hasil Pelaksanaan kegiatan :

Dari rencana kegiatan Layanan kantor yang tertuang dalam usulan kegiatannya yaitu Komponen Pembayaran gaji dan tunjangan dan komponen Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran terdiri dari beberapa sub sub komponen antara lain:

1. Sub Komponen Pembayaran gaji dan tunjangan berisi jumlah kebutuhan gaji dan tunjangan selama satu tahun anggaran dengan memperhitungkan secara detil tiap mata anggaran agar tidak terjadi pagu minus yang menyebabkan terhambatnya pembayaran gaji dan berakibat pada menurunnya kinerja pegawai.
 Anggaran : Rp. 3.893.900.000,-

Realisasi : Rp. 3.683.704.017,- (94,6%)

Realisasi Fisik : 100%

Hasil: Telah dilaksanakan pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur selama 1 tahun, Pembayaran gaji dan tunjangan mengalami kelebihan anggaran yang disebabkan adanya pegawai inspektorat yang pindah ke instansi lain namun anggaranya masih melekat di Dipa Inspektorat.

2. Sub komponen Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran terdiri dari beberapa sub sub komponen antara lain:
 - a. Pengadaan Makanan/ Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh.
 - b. Pemeriksaan Kesehatan Resiko Pekerjaan
 - c. Pengadaan Toga/pakaian kerja/Sopir/Satpam/Tenaga Teknis lainnya
 - d. Perbaikan Peralatan Kantor
 - e. Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor
 - f. Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2
 - g. Operasional Perkantoran dan Pimpinan

Anggaran : Rp. 486.222.000,-

Realisasi : Rp. 485.445.200,- (99,84%)

Realisasi Fisik : 100%

Hasil: Seluruh sub sub komponen telah dilaksanakan sesuai jadwal

II.2 Capaian Kinerja

CAPAIAN KINERJA Inspektorat Triwulan IV Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian Kinerja s/d Triwulan IV	
			Realisasi	Uraian
Peningkatan kinerja unit kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi	Jumlah laporan pencegahan dan pemberantasan korupsi di BATAN	1 Laporan	100.00%	Tersusunnya laporan WBK dan pemantauan aksi PPK tahun 2017 di BATAN
	Jumlah unit kerja yang siap disertifikasi WBK/WBBM	3 Unit Kerja	167.00%	Telah diusulkannya 5 unit kerja yang siap disertifikasi WBK ke Kemenpan&RB (PTLR, Pusdiklat, PRSG, PPIKSN dan PSTNT) dan diperolehnya 1 Unit kerja berpredikat WBK (PTLR)
	Jumlah laporan hasil pengawasan di BATAN	18 Laporan	100.00%	- Terlaksananya evaluasi penyelenggaraan SPIIP pada tingkat unit kerja dan tingkat kegiatan. (PAIR, PTRR, PTBGN dan BU) sebanyak 1 Laporan. - Terlaksananya evaluasi hasil PMPRB oleh Kemenpan&RB sebanyak 1 Laporan. - Terlaksananya evaluasi Laporan Kinerja BATAN oleh Kemenpan RB dan diperolehnya Laporan Hasil Evaluasi untuk 23 Unit Kerja sebanyak 1 laporan. - Terlaksananya reviu RKA pagu anggaran dan alokasi anggaran terhadap 23 Unit Kerja di BATAN sebanyak 1 laporan. - Terlaksananya reviu Laporan keuangan dan diperolehnya laporan hasil reviu semester 2 tahun 2016 dan semester 1 tahun 2017 sebanyak 2 laporan.

				<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya koordinasi dengan unit kerja dan BPK terkait hasil evaluasi dan tindak lanjut sesuai rekomendasi BPK pada semester 1 2017 sebanyak 1 laporan. - Terlaksananya audit kinerja pada 9 Unit kerja (PSMN, PPIKSN, PTKMR, PTKRN, PAIR, PRFN, PSTNT, STTN, PSTA) serta audit kepegawaian pada 6 unit kerja (PSMN, PPIKSN, PTKMR, PTKRN, PAIR dan PRFN) sebanyak 9 laporan. - Terlaksananya reviu Laporan Kinerja BATAN sebanyak 1 laporan. - Terlaksananya RKBMN 20 KPB dan penelaahan oleh DJKN Kementerian keuangan sebanyak 1 laporan.
	Persentase berkurangnya temuan yang berindikasi kerugian negara	6 %	100.00%	Dari hasil audit Inspektorat dan audit BPK s.d. triwulan 4 diperoleh 117 temuan. Dari 117 temuan tersebut terdapat 7 temuan yang berindikasi kerugian negara (3 temuan inspektorat dan 4 temuan BPK) sehingga persentase berkurangnya temuan yang berindikasi kerugian negara sebesar 5,98 %, capaian tersebut masih dibawah maksimal jumlah temuan berindikasi kerugian negara sebesar 6%
	Indeks Reformasi Birokrasi BATAN	73	100.00%	<p>Nilai indeks reformasi birokrasi BATAN belum diperoleh karena penilaian dari kementerian PAN&RB sedang dalam proses, dari segi dokumen telah tercapai 100% dengan rincian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - terlaksananya penilaian hasil PMPRB - tersusunnya laporan PMPRB tahun 2017
	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan	82 %	100.00%	Dari hasil audit Inspektorat dan audit BPK s.d. triwulan 4 diperoleh 117 temuan (88 temuan

				inspektorat dan 29 temuan BPK). Dari 117 temuan tersebut yang telah ditindaklanjuti sebanyak 103 temuan, sehingga diperoleh persentase pelaksanaan tindak lanjut sebesar 88 %, capaian tersebut masih diatas dari target minimal sebesar 82%
	Level maturitas penerapan SPIP	Level 2	100.00%	<p>Hasil level maturitas penerapan SPIP belum dapat diperoleh karena belum ada penilaian dari BPKP, dari segi dokumen telah mencapai 100 % dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya simpulan hasil penyelenggaraan evaluasi SPIP tingkat di unit kerja PTRR, PAIR, PTBGN dan BU

Jumlah Anggaran Kegiatan : Rp. 5.589.175.000,-
Jumlah Realisasi : Rp. 5.373.440.431,-
Persen Realisasi : 96,14%



II.3. Anggaran

Anggaran yang dimiliki Inspektorat dalam melaksanakan program dan kegiatannya adalah sebesar Rp 5.589.175.000,- Sedangkan realisasi yang dicapai sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 5.373.440.431,- atau 96,14%

Realisasi anggaran berdasarkan output dituangkan dalam tabel berikut :

No.	Output/Sub Output/Komponen	TARGET TAHUN 2016		REALISASI TAHUN 2016	
		Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Aparatur	5.589.175.000,-	100	5.373.440.431,-	96,14
1.1	Laporan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di BATAN	18.546.000,-	100	18.394.000,-	99,18
1.1.1	Laporan Pembentukan Wilayah Bebas Korupsi	18.546.000,-	100	18.394.000,-	99,18
1.2	Laporan Hasil Pengawasan di BATAN	731.245.000,-	100	727.790.015,-	99,53
1.2.1	Laporan Penilaian Resiko Dalam Rangka Penerapan SPIP di BATAN	38.151.000,-	100	36.110.000,-	94,65
1.2.2	Laporan Penilaian Kinerja	27.310.000,-	100	27.055.000,-	99,07
1.2.3	Laporan Evaluasi Lakin	44.010.000,-	100	43.845.000,-	99,63
1.2.4	Laporan Reviu RKA unit kerja di batan Tahun 2016	60.418.000,-	100	60.318.000,-	99,83
1.2.5	Laporan Reviu Laporan Keuangan	54.810.000,-	100	54.333.496,-	99,13
1.2.6	Laporan evaluasi laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut temuan BPK	21.230.000,-	100	21.204.019,-	99,88
1.2.7	Laporan Hasil Audit	461.211.000,-	100	461.037.500,-	99,96
1.2.8	Laporan Reviu Laporan Kinerja BATAN	14.969.000,-	100	14.935.000,-	99,77
1.2.9	Lapaoran Hasil Reviu RK BMN	9.986.000,-	100	8.952.000,-	89,65
1.3	Laporan Dukungan Layanan Publik dan Birokrasi	458.412.000,-	100	458.107.199,-	99,93
1.4	Layanan Perkantoran	4.380.122.000,-	100	4.169.149.217,-	95,18

Realisasi anggaran Inspektorat secara lengkap kami sajikan pada tabel di bawah ini ;

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 080 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
ESELON I : 01 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
SATUAN KERJA : 614837 INSPEKTORAT
JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBSB 01
Tanggal : Tuesday, January 01,
Halaman : 1
Prog.Id : lu_irabstkb

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TRANSAKSI KAS								
D1	RUPIAH MURNI								
0	RM								
01	PELAYANAN UMUM								
04	PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN IPTEK								
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BATAN								
3431	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Aparatur								
001	Laporan Penegahan dan Pemberantasan Korupsi di BATAN								
S2	BELANJA BARANG								
S212	Belanja Barang Non Operasional								
S21211	Belanja Bahan	12,716,000	10,486,000	3,284,000	10,334,000	0	10,334,000	98.55	152,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA S212	12,716,000	10,486,000	3,284,000	10,334,000	0	10,334,000	98.55	152,000
S218	Belanja Barang Persediaan								
S21811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2,840,000	1,900,000	950,000	1,900,000	0	1,900,000	100.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA S218	2,840,000	1,900,000	950,000	1,900,000	0	1,900,000	100.00	0
S221	Belanja Jasa								
S22151	Belanja Jasa Profesi	1,800,000	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000	100.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA S221	1,800,000	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000	100.00	0
S241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
S24111	Belanja Perjalanan Biasa	13,090,000	4,760,000	3,570,000	4,760,000	0	4,760,000	100.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA S241	13,090,000	4,760,000	3,570,000	4,760,000	0	4,760,000	100.00	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA S2	30,446,000	18,546,000	7,804,000	18,394,000	0	18,394,000	99.18	152,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 3431.001	30,446,000	18,546,000	7,804,000	18,394,000	0	18,394,000	99.18	152,000
002	Laporan Hasil Pengawasan di BATAN								

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 080 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
ESELON I : 01 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
SATUAN KERJA : 614837 INSPEKTORAT
JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBSB 01
Tanggal : Tuesday, January 01,
Halaman : 2
Prog.Id : lu_irabstkb

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S2	BELANJA BARANG								
S212	Belanja Barang Non Operasional								
S21211	Belanja Bahan	67,534,000	108,589,000	19,157,200	106,914,400	0	106,914,400	98.46	1,674,600
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA S212	67,534,000	108,589,000	19,157,200	106,914,400	0	106,914,400	98.46	1,674,600
S218	Belanja Barang Persediaan								
S21811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	40,159,000	29,670,000	0	29,596,000	0	29,596,000	99.75	74,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA S218	40,159,000	29,670,000	0	29,596,000	0	29,596,000	99.75	74,000
S221	Belanja Jasa								
S22141	Belanja Sewa	16,695,000	0	0	0	0	0	0.00	0
S22151	Belanja Jasa Profesi	5,400,000	7,200,000	5,400,000	5,400,000	0	5,400,000	75.00	1,800,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA S221	22,095,000	7,200,000	5,400,000	5,400,000	0	5,400,000	75.00	1,800,000
S241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
S24111	Belanja Perjalanan Biasa	552,512,000	484,486,000	46,350,000	484,402,069	0	484,402,069	99.98	83,931
S24113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	117,000,000	66,000,000	10,150,000	65,910,000	0	65,910,000	99.86	90,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA S241	669,512,000	550,486,000	56,500,000	550,312,069	0	550,312,069	99.97	173,931
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA S2	799,300,000	695,945,000	81,057,200	692,222,469	0	692,222,469	99.47	3,722,531
S3	BELANJA MODAL								
S321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin								
S32111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36,150,000	36,150,000	0	35,567,546	0	35,567,546	98.39	582,454
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA S321	36,150,000	36,150,000	0	35,567,546	0	35,567,546	98.39	582,454
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA S3	36,150,000	36,150,000	0	35,567,546	0	35,567,546	98.39	582,454
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 3431.002	835,450,000	732,095,000	81,057,200	727,790,015	0	727,790,015	99.41	4,304,985
003	Laporan Dukungan Administrasi Layanan Perkantoran Inspektoral								

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017
 (dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGERI/LEMBAGA : 080 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
 ESELON I : 01 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
 WILAYAH/PROVINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
 SATUAN KERJA : 614837 INSPEKTORAT
 JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBSB 01
 Tanggal : Tuesday, January 01,
 Halaman : 3
 Prog.Id : lu_irabstkb

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEAMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	BELANJA BARANG								
5211	Belanja Barang Operasional								
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	24,000,000	12,290,000	0	12,290,000	0	12,290,000	100.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	24,000,000	12,290,000	0	12,290,000	0	12,290,000	100.00	0
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	53,678,000	67,559,000	1,380,000	67,439,200	0	67,439,200	99.82	119,800
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	14,400,000	0	0	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	68,078,000	67,559,000	1,380,000	67,439,200	0	67,439,200	99.82	119,800
5218	Belanja Barang Persediaan								
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	33,910,000	13,905,000	0	13,902,000	0	13,902,000	99.98	3,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	33,910,000	13,905,000	0	13,902,000	0	13,902,000	99.98	3,000
5231	Belanja Pemeliharaan								
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	82,100,000	77,100,000	14,525,000	77,099,900	0	77,099,900	100.00	100
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	82,100,000	77,100,000	14,525,000	77,099,900	0	77,099,900	100.00	100
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Biasa	248,850,000	262,558,000	8,450,000	262,392,239	0	262,392,239	99.94	165,761
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	248,850,000	262,558,000	8,450,000	262,392,239	0	262,392,239	99.94	165,761
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	456,938,000	433,412,000	24,355,000	433,123,339	0	433,123,339	99.93	288,661
53	BELANJA MODAL								
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin								
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25,000,000	25,000,000	0	24,983,860	0	24,983,860	99.94	16,140
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	25,000,000	25,000,000	0	24,983,860	0	24,983,860	99.94	16,140
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	25,000,000	25,000,000	0	24,983,860	0	24,983,860	99.94	16,140
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 3431.003	481,938,000	458,412,000	24,355,000	458,107,199	0	458,107,199	99.93	304,801

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017
 (dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGERI/LEMBAGA : 080 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
 ESELON I : 01 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
 WILAYAH/PROVINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
 SATUAN KERJA : 614837 INSPEKTORAT
 JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBSB 01
 Tanggal : Tuesday, January 01,
 Halaman : 4
 Prog.Id : lu_irabstkb

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEAMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 3431	1,347,834,000	1,209,053,000	113,216,200	1,204,291,214	0	1,204,291,214	99.61	4,761,786
3431	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Aparatur								
994	Layanan Perkantoran								
51	BELANJA PEGAWAI								
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS								
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,401,300,000	1,341,300,000	93,935,300	1,305,126,000	0	1,305,126,000	97.30	36,174,000
511119	Belanja Pemutusan Gaji PNS	29,000	29,000	1,479	16,706	(20)	16,686	57.54	12,314
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	102,960,000	102,960,000	1,330	92,848,300	0	92,848,300	90.18	10,111,700
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	31,680,000	26,680,000	1,574,254	20,796,262	0	20,796,262	77.95	5,883,738
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	58,366,000	49,270,000	3,790,000	49,270,000	0	49,270,000	100.00	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	170,071,000	175,071,000	13,420,000	168,040,000	0	168,040,000	98.80	7,031,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	85,800,000	40,800,000	611,386	19,681,874	0	19,681,874	48.24	21,118,126
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	85,800,000	85,800,000	4,779,720	57,429,060	0	57,429,060	66.93	28,370,940
511129	Belanja Uang Makan PNS	243,936,000	235,032,000	27,621,000	174,480,000	0	174,480,000	74.24	60,552,000
511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	303,600,000	253,600,000	19,250,000	231,600,000	0	231,600,000	91.32	22,000,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	40,540,000	17,540,000	740,000	14,105,000	(3,360,000)	10,745,000	61.26	6,795,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	2,524,082,000	2,328,082,000	172,974,469	2,133,393,202	(3,360,000)	2,130,033,182	91.64	196,048,818
5122	Belanja Lembur								
512211	Belanja Uang Lembur	36,920,000	36,920,000	9,160,000	34,934,000	0	34,934,000	94.62	1,986,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	36,920,000	36,920,000	9,160,000	34,934,000	0	34,934,000	94.62	1,986,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito								
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	1,332,898,000	1,528,898,000	233,650,996	1,515,376,815	(17,225,404)	1,498,151,411	97.99	30,746,589
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	1,332,898,000	1,528,898,000	233,650,996	1,515,376,815	(17,225,404)	1,498,151,411	99.12	30,746,589

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 080 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
ESELON I : 01 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
WILAYAH/PROVINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
SATUAN KERJA : 614837 INSPEKTORAT
JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBSB 01
Tanggal : Tuesday, January 01,
Halaman : 5
Prog.Id : lu_rabstkb

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	3,893,900,000	3,893,900,000	415,785,465	3,683,704,017	(20,585,424)	3,663,118,593	94.60	230,781,407
52	BELANJA BARANG								
S211	Belanja Barang Operasional								
S21111	Belanja Keperluan Pentarotran	132,000,000	132,000,000	20,521,000	132,000,000	0	132,000,000	100.00	0
S21113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	106,400,000	106,400,000	19,129,000	106,386,000	0	106,386,000	99.99	14,000
S21115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	120,960,000	120,960,000	20,160,000	120,960,000	0	120,960,000	100.00	0
S21119	Belanja Barang Operasional Lainnya	13,720,000	13,720,000	0	13,020,000	0	13,020,000	94.90	700,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	373,080,000	373,080,000	59,810,000	372,366,000	0	372,366,000	99.81	714,000
S212	Belanja Barang Non Operasional								
S21213	Belanja Honor Output Kegiatan	8,160,000	8,160,000	1,360,000	8,160,000	0	8,160,000	100.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	8,160,000	8,160,000	1,360,000	8,160,000	0	8,160,000	100.00	0
S218	Belanja Barang Persediaan								
S21811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	37,762,000	37,762,000	2,140,000	37,727,500	0	37,727,500	99.91	34,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	37,762,000	37,762,000	2,140,000	37,727,500	0	37,727,500	99.91	34,500
S231	Belanja Pemeliharaan								
S23121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20,380,000	15,380,000	2,331,500	15,371,700	0	15,371,700	99.95	8,300
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	20,380,000	15,380,000	2,331,500	15,371,700	0	15,371,700	99.95	8,300
S241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
S24111	Belanja Perjalanan Biasa	15,840,000	15,840,000	1,730,000	15,820,000	0	15,820,000	99.87	20,000
S24113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	36,000,000	36,000,000	3,500,000	36,000,000	0	36,000,000	100.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	51,840,000	51,840,000	5,230,000	51,820,000	0	51,820,000	99.96	20,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	491,222,000	486,222,000	70,871,500	485,445,200	0	485,445,200	99.84	776,800
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 3431 594	4,385,122,000	4,380,122,000	486,656,965	4,169,149,217	(20,585,424)	4,148,563,793	95.18	231,558,207
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 3431	4,385,122,000	4,380,122,000	486,656,965	4,169,149,217	(20,585,424)	4,148,563,793	95.18	231,558,207

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 080 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
ESELON I : 01 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
WILAYAH/PROVINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
SATUAN KERJA : 614837 INSPEKTORAT
JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRBSB 01
Tanggal : Tuesday, January 01,
Halaman : 6
Prog.Id : lu_rabstkb

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 01.04.01	5,732,956,000	5,589,175,000	599,873,165	5,373,440,431	(20,585,424)	5,352,855,007	96.14	236,319,993
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 01.04	5,732,956,000	5,589,175,000	599,873,165	5,373,440,431	(20,585,424)	5,352,855,007	96.14	236,319,993
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 01	5,732,956,000	5,589,175,000	599,873,165	5,373,440,431	(20,585,424)	5,352,855,007	96.14	236,319,993
	JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN 0	5,732,956,000	5,589,175,000	599,873,165	5,373,440,431	(20,585,424)	5,352,855,007	96.14	236,319,993
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01	5,732,956,000	5,589,175,000	599,873,165	5,373,440,431	(20,585,424)	5,352,855,007	96.14	236,319,993
	JUMLAH BELANJA JENIS SATKER KP	5,732,956,000	5,589,175,000	599,873,165	5,373,440,431	(20,585,424)	5,352,855,007	96.14	236,319,993
	JUMLAH TRANSAKSI KAS	5,732,956,000	5,589,175,000	599,873,165	5,373,440,431	(20,585,424)	5,352,855,007	96.14	236,319,993
	JUMLAH BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NON KAS)	5,732,956,000	5,589,175,000	599,873,165	5,373,440,431	(20,585,424)	5,352,855,007	96.14	236,319,993

BAB III KEGIATAN PENDUKUNG

Dalam upaya meningkatkan wawasan dan profesionalisme Inspektorat menugaskan pegawainya untuk mengikuti penyelenggaraan Seminar/ Semiloka/ Lokakarya/ Workshop/ Presentasi Ilmiah/ Diklat/ Kunjungan/ Kegiatan sejenisnya. Daftar kegiatan sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 kami sampaikan pada tabel berikut:

No.	Nama Kegiatan dan Bidang	Tempat & Waktu Penyelenggaraan	Penyelenggara	Nama Peserta	Hasil/ Manfaat
1.	Pelatihan untuk Pelatih Teknik Mengajar	Jakarta, 23-27 Januari 2017	Pusdiklat BATAN	Feri Kustiani	Menambah wawasan
2.	Diklat Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual bagi APIP K/L	Jakarta , 6-10 Februari 2017	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kemenkeu,	Tanti Susanti	Menambah wawasan
3.	Diklat Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual bagi APIP K/L	Jakarta , 6-10 Februari 2017	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kemenkeu,	Retnani DA	Menambah wawasan
4.	Diklat Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual bagi APIP K/L	Jakarta , 6-10 Februari 2017	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kemenkeu	Andes Goutama	Menambah wawasan
5.	Diklat Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual bagi APIP K/L	Jakarta , 6-10 Februari 2017	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kemenkeu	Setiyani Ikha P	Menambah wawasan
6.	Diklat Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual bagi APIP K/L	Jakarta , 6-10 Februari 2017	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kemenkeu	Ety Murniasih	Menambah wawasan
7.	Diklat Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual bagi APIP K/L	Jakarta , 6-10 Februari 2017	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kemenkeu	Aditya Ade Nurdianto	Menambah wawasan
8.	Diklat Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual bagi APIP K/L	Jakarta , 6-10 Februari 2017	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kemenkeu	Lisda	Menambah wawasan
9.	Diklat Penjenjangan Auditor Muda	Ciawi, 23 Februari s/d 11 Maret 2017	Pusdiklatwas BPKP Ciawi, Bogor	Andes Goutama	Peningkatan keahlian
10.	Diklat Penjenjangan Auditor Ahli	Ciawi, 6 Maret s/d 21 Maret 2017	Pusdiklatwas BPKP Ciawi, Bogor	Ririn Yekti Rahayuningsih	Peningkatan keahlian
11.	Diklat SMM-SB 01 SNI 9001:2016	4-6 April 2017	Pusdiklat Batan	Andes Goutama,	Peningkatan keahlian
12.	Diklat SMM-SB 01 SNI 9001:2016	4-6 April 2017	Pusdiklat Batan	Epi Woro Kartini	Peningkatan keahlian
13.	Penilaian Matuitas SPIP	16-22 Juli 2017	Hotel Mirah Bogor	Retnani Dwi Angganingsih	Peningkatan keahlian
14.	Bendahara Pengeluaran	17-22 Juli 2017	Pusdiklat Batan	Sumarni	Peningkatan keahlian
15.	Harmonisasi Atribut Budaya Keselamatan	9-10 Oktober 2017	Pusdiklat Batan	Andes Goutama	Menambah wawasan
16.	Harmonisasi Atribut Budaya Keselamatan	9-10 Oktober 2017	Pusdiklat Batan	Epi Woro Kartini	Menambah wawasan
17.	Diklat Penyiapan Strategis Sumber	1-2 Nopember 2017	Pusdiklat Batan	Kriswanto, SE	Menambah wawasan

	Daya untuk Implementasi Clearing House Teknologi Nuklir				
18	Diklat Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi SDM	13-15 Nopember 2017	Pusdiklat Batan	Indra Kurniawan	Peningkatan keahlian
19	Diklat Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi SDM	13-15 Nopember 2017	Pusdiklat Batan	Dwi Rahardjo	Peningkatan keahlian

BAB IV PENUTUP

Laporan Tahunan Inspektorat tahun 2017 ini telah menyajikan pencapaian indikator kinerja utama, yang tercermin dalam indikator kinerja kegiatan pada tahun 2017. Disamping itu juga telah disajikan kegiatan Inspektorat lainnya yang tidak tercantum dalam perjanjian kinerja tahun 2017 serta pencapaiannya. Namun sayangnya kegiatan Inspektorat tidak didukung oleh anggaran yang memadai sehingga kualitas outputnya tidak maksimal.

Pada tahun 2017 secara umum Inspektorat telah merealisasikan seluruh kegiatan untuk mencapai visi dan misi sebagaimana yang tercantum dalam Renstra 2015-2019. Hasil pencapaian pelaksanaan kegiatan dari tahun ke tahun diharapkan selalu sesuai dengan Renstra dan dokumen perencanaan lainnya.

Upaya ke depan yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja Inspektorat adalah:

1. Melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap temuan yang belum ditindaklanjuti.
2. Melakukan mediasi untuk penyelesaian temuan yang sulit ditindaklanjuti.
3. Melakukan pembinaan secara berkala kepada satuan kerja dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Negara, antara lain melalui sosialisasi, asistensi dll.
4. Meningkatkan peran Inspektorat sebagai katalisator dalam bentuk konsultan dan *quality assurance*.
5. Secara berkala menambah jumlah auditor yang disesuaikan dengan beban kerja Inspektorat yang semakin meningkat.
6. Menambah kegiatan diklat untuk meningkatkan kompetensi auditor

Dengan disusunnya Laporan Kegiatan tahun 2017, Inspektorat telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya yang selanjutnya akan digunakan untuk memperbaiki kinerja pada masa yang akan datang.